

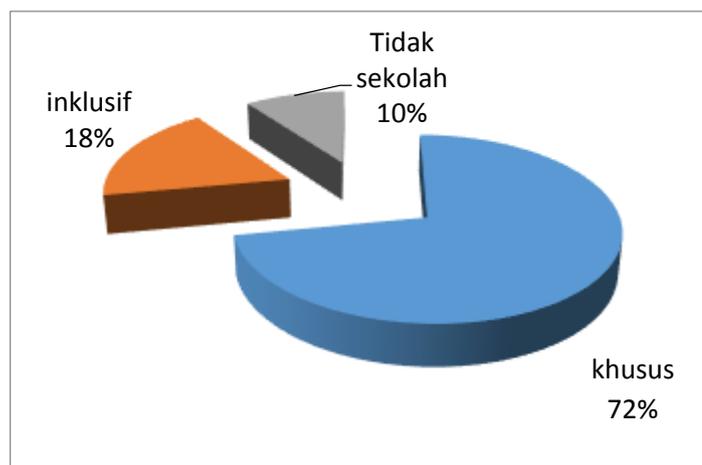
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pernyataan Salamanca tentang pendidikan Inklusif (UNESCO, 1994) membawa dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia. Inti pernyataan tersebut menekankan bahwa semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Sistem pendidikan yang memfasilitasi keberagaman dan kebutuhan setiap anak tersebut dinamakan pendidikan inklusif (Mwangi, Aluko, & Associate, 2014). Pendidikan inklusif di Indonesia diatur melalui Permendiknas RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Bunyi pasal (1) dari peraturan menteri tersebut adalah “Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.” Bunyi pasal tersebut menyiratkan bahwa dalam pendidikan inklusif, peserta didik dengan berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik umumnya di sekolah reguler.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tercatat pada tahun 2014 terdapat 2430 sekolah inklusif dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah dengan jumlah peserta didik sebesar 36000 peserta didik (Tarsidi, 2015). Data terkini memperkirakan jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang bersekolah pada jalur pendidikan khusus dan pendidikan reguler pelaksana sekolah inklusif dari jenjang PAUD sampai pendidikan menengah di Indonesia digambarkan melalui gambar berikut.



Sumber : Data diolah dari (Kemendikbud 2017).

Gambar 1.1 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang Bersekolah di Sekolah Reguler dan Sekolah Khusus

Dari gambar tersebut, sebesar 1,6 juta, 115 ribu (72%) bersekolah di pendidikan khusus dan 299 ribu (18%) bersekolah di sekolah reguler pelaksanaan sekolah inklusif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Angka tersebut berarti masih ada 10% anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan layanan pendidikan di seluruh Indonesia dengan berbagai jenis kelainan, dan tersebar di seluruh pedesaan dan pusat-pusat kota. Masih adanya anak berkebutuhan khusus yang belum terlayani disebabkan oleh permasalahan berikut: 1) program masih diorientasikan untuk beberapa jenis kelainan saja, belum menjangkau terhadap semua anak berkelainan sesuai proporsinya; 2) belum adanya pendataan anak berkelainan dan kecerdasan istimewa, serta tak beruntung secara geografis, sosial, ekonomis, dan kultural, khususnya mereka yang belum mendapatkan layanan pendidikan sehingga data yang dimiliki belum memberikan informasi yang tepat; 3) belum optimalnya keterlibatan sektor lain yang terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik dalam layanan pendidikan bagi ABK (Direktorat PKLK, 2016).

Komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat dilihat dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 dalam tujuan strategis 3 yaitu peningkatan akses pendidikan salah satunya melalui peningkatan akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus

(Kemendikbud RI, 2015, hlm.39). salah satu realisasinya adalah dengan dialokasikannya dana bantuan operasional penyelenggaraan untuk PAUD inklusif maupun bagi anak berkebutuhan khusus baik yang ada di TKLB maupun di PAUD Inklusif (Direktorat Pembinaan PAUD, 2018). Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan inklusif secara nasional tahun 2015 – 2018. Hasil pengkajian (Direktorat PKLK, 2016) hambatan yang dihadapi tersebut yaitu: 1) belum semua daerah di Indonesia memiliki Perda/Kebijakan khusus tentang implementasi pendidikan inklusif; 2) komite sekolah belum mengambil peran aktif dalam menunjang implementasi pendidikan inklusif; 3) organisasi-organisasi profesi dan yang terkait dengan ABK belum berperan secara aktif dalam implementasi pendidikan inklusif; 4) kurangnya keterlibatan perguruan tinggi dalam implementasi pendidikan inklusif; 5) pemahaman kepala sekolah, guru dan pengambil kebijakan di daerah terhadap konsep dasar pendidikan inklusif masih terbatas dan bervariasi; 6) terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus/guru kunjung dari sekolah khusus terdekat ke sekolah inklusif; 8) SDM yang ada di sekolah inklusif sebagian besar mengalami kesulitan dalam melakukan modifikasi kurikulum, maupun assesmen akademik dan non akademik bagi ABK; 9) sebagian besar sekolah inklusif belum mempunyai ruang layanan khusus (*assesmen room*); 10) sistem penerimaan siswa baru yang menerapkan sistem *on-line* tanpa kuota untuk ABK menyulitkan ABK diterima di sekolah reguler; 11) sebagian besar orang tua dan masyarakat berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya bersekolah di sekolah khusus, sedangkan sebagian berpendapat bahwa anak cacat sebaiknya bersekolah di sekolah reguler untuk perkembangan sosialnya sehingga sikap ini mempengaruhi jumlah siswa yang masuk di sekolah reguler

Tujuan pendidikan inklusif baik secara nasional maupun global akan tercapai jika dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi. Hasil penelitian efek pendidikan inklusif bagi perkembangan anak menghasilkan dukungan penuh untuk pelaksanaan pendidikan inklusif pada anak usia dini (Kurniasih, 2014) dan (Odom, 2016). Hasil kajian konseptual dan kajian-kajian ilmiah lain tentang pemberian layanan pendidikan anak usia dini telah

menunjukkan adanya nilai-nilai positif terhadap perkembangan anak. Nilai-nilai positif yang diperoleh anak usia dini dari hasil pendidikan inklusif merupakan strategi untuk meningkatkan kompetensi kunci yang menentukan kesuksesannya dimasa yang akan datang. Selain itu melalui pendidikan inklusif, anak disabilitas sepenuhnya bisa menyatu dan beradaptasi dengan lingkungan sosial di kelas inklusifnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gargiulo dalam (Mudjito & Dkk., 2012, hlm.13) yang mengemukakan tujuan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di usia dini adalah: 1) meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal; 2) mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidakteraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan; 3) mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya.

Penyelenggaraan PAUD inklusif secara nasional di respon baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung hal ini direalisasikan dengan disusunnya program kerja pendidikan inklusif Kabupaten Bandung Periode Tahun 2013 s.d 2015. Realisasi program kerja tersebut adalah: 1) dikeluarkannya kebijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 pasal 56 (2) yang menyatakan bahwa peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial dilayani melalui pendidikan khusus berbentuk sekolah luar biasa dan atau/ kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing. Selain itu komitmen tersebut direalisasikan dalam bentuk penataan manajemen kelembagaan pendidikan inklusif; 2) penataan manajemen kelembagaan pendidikan inklusif; 3) peningkatan kompetensi SDM; 4) pendampingan penyelenggaraan sekolah inklusif; 5) penyediaan sarana dan prasarana; 6) pengembangan kerjasama kemitraan (Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, 2013).

Jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Bandung berdasarkan referensi data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 dapat dilihat melalui tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Lembaga PAUD di Kabupaten Bandung Tahun 2017

No.	TK/RA	Kober	TPA	SPS	Jumlah
1.	1247	960	15	367	2589

Sumber: Referensi Data Kemendikbud Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, di Kabupaten Bandung terdapat 2589 lembaga PAUD yang terdiri dari 1247 TK/RA, 960 Kelompok Bermain, 15 Taman Penitipan Anak dan 367 Lembaga PAUD Sejenis. Dari sekian banyaknya lembaga PAUD di Kabupaten Bandung baru ada 6 lembaga PAUD (0,02 %) yang menyelenggarakan pendidikan inklusif (Pemkab Bandung, 2017). Minimnya jumlah lembaga PAUD inklusif di Kabupaten Bandung tidak sebanding dengan kebutuhan belajar anak usia dini apalagi hampir di semua lembaga PAUD terdapat anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Menurut penjelasan (Jamaris, 2006) di taman kanak-kanak selalu terdapat anak yang memiliki masalah-masalah perilaku psikososial, berkesulitan belajar, ataupun anak dengan gangguan pemusatan perhatian/hiperaktif, namun di sisi lain terdapat anak dengan tingkat intelegensi yang luar biasa, seperti anak tuna grahita atau anak *gifted* dan berbakat.

Keberhasilan penyelenggaraan PAUD inklusif membutuhkan sejumlah prasyarat tertentu. Hasil penelitian (Barton & Smith, 2015) menyatakan bahwa Paud inklusif yang efektif memiliki 3 dimensi yaitu 1) akses terhadap kesempatan belajar misalnya melalui penyediaan materi dan sarana pembelajaran yang dapat digunakan oleh anak yang dengan dan tanpa berkebutuhan khusus; 2) adanya partisipasi aktif dalam pembelajaran, dengan batuan orang dewasa dengan pendekatan individual; 3) dukungan dari orang dewasa (kepala sekolah, guru, orang tua) dan sumberdaya yang dapat membantu anak belajar.

Penerapan pendidikan inklusif pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini seperti halnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengelolaan PAUD inklusif di Indonesia masih menunjukkan adanya permasalahan, diantaranya: 1) keterbatasan jumlah dan kompetensi pendidik dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus; 2) kurangnya kompetennya tenaga kependidikan (kepala PAUD) dalam mengelola pendidikan inklusif; 3) minim ketersediaan sarana

prasarana yang dapat diakses anak berkebutuhan khusus; 4) kurangnya kepedulian dari orang tua dan masyarakat; 5) kurangnya terapis yang mendampingi di kelas; 6) kurangnya kerjasama dari pihak terkait seperti masyarakat, ahli profesional dan pemerintah (Kurniasih, 2014), (Masitah, 2015), dan (Lestaringrum, 2017).

Hambatan-hambatan yang muncul tersebut dapat diatasi melalui kesediaan orang-orang untuk berpartisipasi dan bekerjasama. Hal ini sesuai pernyataan (Stubbs, 2011, hlm. 87) yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak tergantung pada suatu formula yang sempurna, tetapi ditentukan oleh kesediaan orang untuk bekerjasama. Partisipasi dan kerjasama yang terjalin di satuan pendidikan akan terwujud melalui kepemimpinan kepala sekolah yang dapat mengarahkan, menggerakkan dan mendorong mereka menuju keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sesuai pernyataan (Johnsen & Skjorten, 2003, hlm.53) bahwa implementasi pendidikan inklusif di sekolah sangat tergantung pada sikap, pengetahuan, fleksibilitas dan kemampuan kreatif kepala sekolah dan mendesentralisasikan pengambilan keputusan hingga kepada individu guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Frederickson dan Cline dalam (Mudjito and Dkk., 2012) bahwa sikap, sifat dan aktivitas kepemimpinan kepala sekolah inklusif memberi kontribusi bagi keberhasilan sekolah inklusif dan bagi profesionalitas bagi kelompok yang dipimpinnya.

Pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan di atas menyiratkan bahwa sifat, perilaku dan aktivitas kepala sekolah merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan inklusif. Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian (Smith, 2014, hlm. 403) yang menyatakan bahwa beberapa sifat dan perilaku utama kepala sekolah yang mempermudah keberhasilan sekolah inklusif adalah: 1) mengambil posisi yang jelas dalam mendukung proses penerapan pendidikan inklusif sebagai kepercayaan dan nilai-nilai inklusi bagi peserta didik penyandang hambatan; 2) memiliki pandangan, proaktif dan menunjukkan komitmen bagi nilai-nilai tersebut; 3) memiliki harapan yang tinggi kepada guru dan peserta didik; 4) seorang komunikator yang baik; 5) menyiapkan guru dengan waktu persiapan dan perencanaan yang memadai; 6) mendorong keterlibatan orang tua. Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil penelitian (Lindqvist

& Nilholm, 2013, hlm.95) yang meneliti 45 kepala pra-sekolah di Swedia, diperoleh hasil bahwa kepala pra-sekolah inklusif harus memberikan lebih banyak dukungan dan perhatian kepada peserta didik dibandingkan pada sekolah biasa. Menurut Guzman dan Schofield dalam (Guzmán, 1997, hlm. 441) kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penting bagi keberhasilan penerapan sekolah ditinjau secara struktural maupun secara filosofis. Sedangkan komponen penting yang harus dimiliki kepala sekolah inklusif yaitu: 1) membangun visi dan komitmen bersama; 2) berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran dengan membangun komunitas profesional; 3) merancang kembali program sekolah; 4) berbagi tanggung jawab dalam mewujudkan pendidikan inklusif (Billingsley dkk., 2014, hlm. 25).

Kepala PAUD merupakan pemimpin formal di lembaga atau satuan PAUD yang memiliki peran dan tanggung jawab yang strategis dalam menentukan keberhasilan tujuan lembaga. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini menegaskan posisi kepala PAUD sebagai tenaga kependidikan yang memiliki peranan dan tanggung jawab dalam menentukan keberhasilan lembaga yang dipimpinnya. Peranan dan tanggung jawab tersebut mewajibkan kepala PAUD untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Kualifikasi yang dimaksud terdiri dari persyaratan akademik, usia, pengalaman, pangkat (untuk PNS) serta memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga pemerintah. Sedangkan kompetensi yang wajib dimiliki kepala PAUD terdiri dari kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi.

Peran yang harus dijalankan kepala PAUD adalah sebagai seorang pemimpin dan sebagai manajer. Peranan sebagai pemimpin dapat dilihat sebagai orang yang menjalankan fungsi kepemimpinannya yaitu membangun dan mengembangkan kultur organisasi, sedangkan sebagai seorang manajer terutama tertuju pada pemeliharaan struktur, prosedur, dan tujuan yang berlaku (Rohiat, 2012) dan (Danim dan Suparno, 2009, hlm. 5).

Peran kepemimpinan yang harus dijalankan kepala PAUD adalah kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, sekaligus

mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang ditetapkan (Wahyudi, 2015, hlm. 97).

Keberhasilan pemimpin dalam menjalankan tugas kepemimpinannya dalam pencapaian organisasi disebut kepemimpinan efektif (Yukl, 2009). Hasil penelitian kepemimpinan efektif kepala sekolah terbukti memberikan efek positif pada motivasi guru dan penerapan strategi pembelajaran. Kedua efek positif ini memberikan dampak pada peningkatan prestasi peserta didik (Al-Jabari, dkk., 2014, hlm. 7).

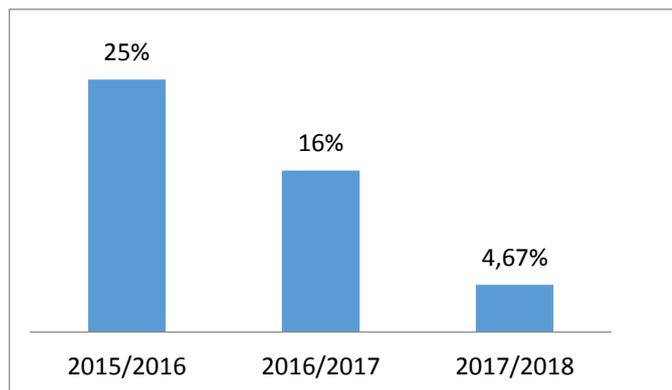
Penelitian yang membuktikan kepemimpinan efektif merupakan faktor penting terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini diantaranya dibuktikan oleh Bush, (2013) dan Irvine dkk. (2010). Hasil kajian (Bush, 2013, hlm. 3) terhadap 2 artikel yang berfokus pada pendidikan anak usia dini menghasilkan kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan anak usia dini. Identifikasi sikap kepemimpinan kepala sekolah diantaranya adanya 1) rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap anggota sekolah; 2) memiliki kesiapan dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan inklusi; 3) menghargai dan mempromosikan keragaman peserta didik; 4) melibatkan semua komponen sekolah untuk meraih keberhasilan; 5) menghargai semua siswa; 6) menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua; 7) pengembangan profesional Irvine & dkk., 2010 hlm, 70-88).

Kepemimpinan efektif ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan bawahannya. Pendekatan yang digunakan berhubungan dengan kekuasaan, perilaku, situasional dan sifat pemimpin (Yukl, 2009, hlm. 13). Lebih lanjut, (Yukl, 2009, hlm. 13) membagi tiga variabel untuk menentukan efektivitas kepemimpinan yaitu: 1) karakteristik pemimpin; 2) sikap pengikut; dan 3) karakteristik situasi. Sedangkan (Hoy, K dan Miskel, 2014, hlm.65) membagi variable kepemimpinan efektif kedalam dua aspek yaitu aspek objektif dan subjektif. Aspek objektif yaitu pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan aspek subjektif terdiri dari evaluasi kasat mata (perilaku yang diperlihatkan) terhadap kelompok rujukan signifikan dan kepuasan kerja para bawahan. Model praktik kepemimpinan efektif dikenalkan (Kouzes & Posner, 2004, hlm. 13)

sebagai lima praktek kepemimpinan teladan. Kelima praktek kepemimpinan tersebut adalah: 1) *model the way* (memberi contoh); 2) *inspire a shared vision* (menginspirasi visi bersama); 3) *challenge the process* (menantang proses); 4) *enable others to act* (memungkinkan orang lain bertindak); 5) *encourage the heart* (menyemangati jiwa).

Penerapan pendidikan inklusif untuk jenjang anak usia dini sudah banyak dilakukan di lembaga PAUD seperti Kelompok Bermain (*play group*), Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal terutama yang berada di kota-kota besar dengan ditunjang oleh ketersediaan tenaga pendidik dan terapis yang kompeten, tersedianya tenaga ahli dan konselor serta sarana dan prasarana yang memadai. Namun keberadaan lembaga PAUD yang menerapkan pendidikan inklusif ini tidak bisa dinikmati oleh semua anak berkebutuhan khusus karena pada umumnya lembaga PAUD inklusif biayanya sangat mahal, namun meskipun demikian di Kabupaten Bandung ada sebuah lembaga PAUD inklusif yaitu PAUD Nur Azizah yang terletak di Kampung Jatimekar nomor 39 RT 07 RW 06 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. PAUD Nur Azizah berdiri di atas lahan milik Yayasan Al-Husaini seluas 378 m² dengan luas bangunan 105 m². Kondisi lingkungan PAUD Nur Azizah merupakan daerah pedesaan serta kondisi orang tua peserta didik pada umumnya merupakan masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Lembaga PAUD ini telah menerapkan pendidikan inklusif sejak tahun 2007. Jenis layanan PAUD yang disediakan yaitu kelompok bermain (kober) untuk peserta didik usia 2 – 4 tahun, dan TK untuk peserta didik usia 5-6 tahun. Setiap tahunnya lembaga ini menerima peserta didik reguler dan peserta didik yang memiliki gejala maupun yang sudah terdeteksi memiliki kebutuhan khusus. Adapun persentase jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang berada di PAUD Nur Azizah Tahun ajaran 2015/2016 s.d tahun 2017/2018 dapat dilihat melalui grafik berikut.



Gambar 1.2 Grafik Persentase Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di PAUD Nur Azizah Tahun 2015/2016 s.d Tahun 2017/2018

Gambar 1.2 menunjukkan grafik persentase jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di PAUD Nur Azizah. Berdasarkan grafik tersebut, walaupun dalam tiga tahun mengalami penurunan jumlah anak berkebutuhan khusus, namun menunjukkan adanya konsistensi PAUD Nur Azizah dalam menerima anak berkebutuhan khusus. Pada tahun ajaran 2017/2018 peserta didik yang sudah terdeteksi berkebutuhan khusus yang ada di PAUD Nur Azizah berdasarkan hasil asesmen terdiri dari peserta didik yang memiliki jenis hambatan bicara, kelainan fisik (*hydrocephallus*), autis ringan dan lamban belajar.

Keberhasilan PAUD Nur Azizah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif juga dapat dilihat melalui hasil pengkajian yang dilakukan oleh (Wahyuningsih dkk., 2015) terhadap lembaga PAUD Nur Azizah yang menunjukkan keberhasilan lembaga ini dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Hasil yang diperlihatkan adalah adanya perubahan peningkatan peserta didik dalam respon, perhatian, interaksi, pengendalian emosi, serta kemauan dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, hasil yang diperoleh adalah adanya respon kepuasan dari orang tua peserta didik baik bagi orang tua peserta didik berkebutuhan khusus maupun non berkebutuhan khusus setelah mengikutsertakan anak mereka kedalam pembelajaran di lembaga PAUD Nur Azizah. Selain itu setiap tahunnya lembaga ini selalu menerima dana bantuan operasional penyelenggaraan untuk anak berkebutuhan khusus (BOP ABK) dari Direktorat PAUD dan Dikmas serta menjadi sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam penguatan manajemen kelembagaan pendidikan inklusif, peningkatan SDM

pendidikan inklusif, program pendampingan sekolah inklusif. Serta jalinan kemitraan dengan berbagai pihak baik dari instansi pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Keberhasilan perkembangan peserta didik tersebut tidak terlepas dari peranan Kepala PAUD Nur Azizah dalam mempengaruhi, menggerakkan serta memotivasi stafnya terutama guru dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.

Latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, menjadi dasar bagi peneliti dalam mengeksplorasi lebih mendalam terhadap “Kepemimpinan Efektif Kepala PAUD Nur Azizah dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif” yang akan digambarkan secara sistematis dan empiris dalam penelitian ini.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan lembaga PAUD inklusif dalam mencapai tujuan ditentukan oleh praktek kepemimpinan kepala PAUD yang efektif. Tanpa adanya dukungan Kepala PAUD, usaha untuk menciptakan pendidikan inklusif pada jenjang anak usia dini tidak akan berhasil. Peranan kepemimpinan kepala dalam mewujudkan pendidikan inklusif terutama dalam mengarahkan, menggerakkan dan mendorong warga sekolah dan pihak lain untuk terus menerus berpartisipasi dan bekerja sama dalam mewujudkan PAUD inklusif. Menurut pernyataan (Johnsen & Skjorten, 2003, hlm.53) bahwa implementasi pendidikan inklusif di sekolah sangat tergantung pada sikap, pengetahuan, fleksibilitas dan kemampuan kreatif kepala sekolah dan mendesentralisasikan pengambilan keputusan hingga kepada individu guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Frederickson dan Cline dalam (Mudjito and Dkk., 2012) bahwa sikap, sifat dan aktivitas kepemimpinan kepala sekolah inklusif memberi kontribusi bagi keberhasilan sekolah inklusif dan bagi profesionalitas bagi kelompok yang dipimpinnya.

Hal yang memberi kontribusi efektif dan perlu dimiliki kepala sekolah adalah: 1) kedisiplinan dan dasar pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus (cakap, percaya diri, rasional, dan tidak arogan); 2) memiliki kemampuan untuk

berkolaborasi (*partnership, negotiation, networking, communicating, reframing, confronting, flexibility, monitoring, and evaluating*); 3) *values* (memperhatikan bawahan, respek, dan keterbukaan). Sejalan dengan pernyataan tersebut, sifat kepala sekolah yang mempermudah keberhasilan kepala sekolah dalam mewujudkan pendidikan inklusif menurut penelitian (Smith, 2014, hlm. 403) adalah 1) mengambil posisi yang jelas dalam mendukung proses penerapan nilai-nilai inklusi; 2) memiliki pandangan, proaktif dan komitmen bagi nilai-nilai inklusi; 3) pengharapan yang jelas dari kepala sekolah kepada guru dan peserta didik; 4) komunikator yang baik; 5) menyiapkan guru dengan persiapan dan perencanaan yang memadai; 6) mendorong keterlibatan orang tua.

Elemen kunci kepemimpinan efektif sekolah inklusif menurut (Hoppey & Mcleskey, 2013, hlm. 56) adalah memfasilitasi terciptanya budaya sekolah yang mendukung guru, mengembangkan kepemimpinan guru, bekerja untuk mengembangkan kolaborasi, komunitas belajar profesional untuk megembangkan guru. Sedangkan menurut (McLeskey, Billingsley, & Waldron, 2016, hlm.56) kunci keberhasilan dalam memimpin sekolah inklusif adalah: 1) menyusun dan menyampaikan visi; 2) memfasilitasi pengalaman belajar yang berkualitas tinggi bagi peserta didik; 3) membangun kapasitas profesional; 4) membuat forum pendukung pembelajaran; 5) bermitra dengan pihak luar sekolah. Sedagkan menurut hasil kajian (Billingsley Dkk., 2014, hlm.31) faktor yang menentukan kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif adalah: 1) membangun visi dan komitmen bersama; 2) berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran; 3) merancang kembali program sekolah; 4) berbagi tanggung jawab dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

Lembaga PAUD Nur Azizah yang terletak di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dinilai telah berhasil menerapkan pendidikan inklusif sejak tahun 2007. Setiap tahunnya lembaga ini menerima peserta didik reguler dan peserta didik yang memiliki gejala maupun yang sudah terdeteksi memiliki kebutuhan khusus. Berdasarkan kajian tentang konsep kepemimpinan tersebut maka diasumsikan bahwa keberhasilan lembaga ini dalam menyelenggarakan PAUD Inklusif ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan Kepala PAUD yang telah memimpin dari mulai PAUD Nur Azizah berdiri (Tahun 2007) sampai

sekarang (Tahun 2018). Berdasarkan hal tersebut maka perlu diidentifikasi secara mendalam tentang gambaran perilaku kepemimpinan efektif kepala PAUD Nur Azizah dalam menerapkan PAUD inklusif.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah dan penelitian dilakukan secara mendalam. Adapun kriteria kepemimpinan efektif yang dijadikan fokus dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Gambaran kepemimpinan efektif Kepala PAUD Inklusif dalam membangun visi dan komitmen bersama.
2. Gambaran kepemimpinan efektif Kepala PAUD Inklusif yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran.
3. Gambaran kepemimpinan efektif Kepala PAUD Inklusif dalam memberdayakan warga sekolah dan pihak lain dalam mewujudkan pendidikan inklusif.
4. Gambaran kepemimpinan efektif Kepala PAUD Inklusif dalam mengembangkan warga sekolah.

Fokus permasalahan tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan permasalahan penelitian ini adalah: “Bagaimana gambaran perilaku kepemimpinan efektif Kepala PAUD dalam penyelenggaraan PAUD inklusif?”. Pokok-pokok permasalahan yang telah disampaikan, selanjutnya rumusan permasalahan dikembangkan ke dalam butir-butir pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kepemimpinan efektif Kepala PAUD inklusif dalam membangun visi dan komitmen bersama?
 - a. Bagaimana gambaran perilaku kepemimpinan Kepala PAUD inklusif dalam membangun visi lembaga?
 - b. Bagaimana gambaran perilaku kepemimpinan Kepala PAUD inklusif dalam membangun komitmen bersama?
2. Bagaimana gambaran kepemimpinan efektif kepala PAUD inklusif yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran?
 - a. Bagaimana gambaran perilaku kepemimpinan Kepala PAUD inklusif dalam menciptakan iklim dan budaya sekolah inklusif?

- b. Bagaimana gambaran perilaku kepemimpinan Kepala PAUD inklusif yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran bagi peserta didik?
3. Bagaimana gambaran kepemimpinan efektif Kepala PAUD inklusif dalam memberdayakan warga sekolah dan pihak lain dalam mewujudkan pendidikan inklusif?
 - a. Bagaimana gambaran perilaku kepemimpinan Kepala PAUD inklusif dalam memberdayakan warga sekolah?
 - b. Bagaimana gambaran perilaku kepemimpinan Kepala PAUD inklusif dalam memberdayakan pihak lain?
4. Bagaimana gambaran kepemimpinan efektif Kepala PAUD inklusif dalam mengembangkan warga sekolah?
 - a. Bagaimana gambaran perilaku kepemimpinan Kepala PAUD inklusif dalam meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan?
 - b. Bagaimana gambaran perilaku kepemimpinan Kepala PAUD inklusif dalam mendorong warga sekolah untuk berprestasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bermaksud untuk menggali, menghimpun dan menganalisis informasi empiris proses penerapan kepemimpinan efektif di lembaga PAUD inklusif. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perilaku dalam proses kepemimpinan Kepala PAUD yang efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut.

1. Kepemimpinan efektif Kepala PAUD inklusif dalam membangun visi dan komitmen bersama.
2. Kepemimpinan efektif Kepala PAUD inklusif yang berfokus pada pencapaian tujuan lembaga.
3. Kepemimpinan efektif Kepala PAUD inklusif dalam memberdayakan warga sekolah dan pihak lain dalam mewujudkan pendidikan inklusif.
4. Kepemimpinan efektif Kepala PAUD inklusif dalam mengembangkan warga sekolah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah keilmuan tentang bagaimana penerapan kepemimpinan efektif dalam mewujudkan PAUD inklusif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a. Bagi lembaga PAUD termasuk kepala sekolah dan guru sebagai acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan layanan PAUD inklusif.
- b. Bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menentukan strategi pendidikan inklusif khususnya bagi anak usia dini.
- c. Bagi orang tua anak usia dini dalam menentukan pilihan pendidikan yang tepat bagi anaknya sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Bagi peneliti lain, menambah ilmu dan wawasan sebagai bekal dalam ikut serta menjalankan pendidikan inklusif.

1.5. Struktur Organisasi Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari lima Bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang uraian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang menjadi arah dalam melaksanakan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penelitian.

Bab dua berisi tentang kajian pustaka, kerangka pemikiran penelitian, dan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian pustaka merupakan uraian dari konsep, teori, prinsip sebagai dasar penelitian.

Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, cara pengumpulan data, dan langkah-langkah analisis data yang digunakan.

Bab empat menguraikan tentang hasil temuan penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan secara rinci temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan

dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian dan uraian tentang pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya.

Bab lima berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi. Bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.